



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

EVALUASI PEMBANGUNAN FISIK DESA PULAU KEDUNDUNG KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

Gerri Vanlik

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : Vanlika099@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pembangunan Fisik Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Informan pada penelitian ini adalah sebanyak 4 orang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, teknik Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 sudah dilaksanakan sebaik mungkin, hanya saja jalan tani yang cepat rusak itu disebabkan oleh jalan yang tidak kuat dengan beban yang melalui jalan tersebut, dan diperparah dengan faktor alam hingga jalan tersebut cepat rusak, namun dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.

Keywords: Evaluasi, Pembangunan Fisik

Abstract

This research was conducted in Pulau Kedundung Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the Village Community Empowerment in Pulau Kedundung Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the study was How to Empower Villages in Pulau Kedundung Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. Informants in this study were 4 people using Purposive Sampling technique, Purposive Sampling technique is a sampling technique with certain considerations. The results showed that the Physical Development in Pulau Kedundung Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2017 had been carried out as well as possible, only that the fast damaged road was caused by a road that was not strong with loads that passed through the road, and was worsened by natural factors to the road these are easily damaged, but in the implementation of Physical Development in Pulau Kedundung Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2017 has been implemented well.

Keywords: Evaluation, Physical Development

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan Nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Penelitian ini dikhususkan pada desa pulau kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, pengalaman selama ini yang digulirkan oleh pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan di desa pulau kedundung.

Desa Pulau Kedundung merupakan salah satu desa yang berpenduduk nomor IV terkecil dari 26 desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai posisi geografis sangat dekat dengan ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk 1.082 jiwa terdiri dari 518 orang laki-laki dan 564 orang perempuan dengan luas wilayah 2.253 Ha.

Prinsipnya dengan jumlah penduduk yang relative masih kecil ini, merupakan kemudahan bagi pimpinan desa untuk mempengaruhi dan mengarahkan penduduknya untuk mencapai tujuan pembangunan Desa. Untuk penyelenggaraan evaluasi pembangunan di pedesaan, diperlukan proaktif dari pimpinan pedesaan beserta jajarannya.

Dalam hal pembangunan desa di Desa Pulau Kedundung berdasarkan rancangan kerja pemerintah desa tahun 2018 memiliki 4 Bidang, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun Pendapatan dan belanja desa Pulau Kedundung tahun 2017 dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Kedundung Tahun 2017

| No | Rencana Kerja Pemerintah Desa | Biaya |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Rp. 307.635.000,- |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | Rp. 765.848.000,- |
| 3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 26.315.000,- |
| 4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 88.812.000,- |
| Jumlah | | Rp. 1.188.610.000,- |

Sumber: Kantor Desa Pulau Kedundung 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat Anggaran Belanja Rencana Kerja Pemerintah Desa sebesar Rp.1.188.610.000,-. Adapun program pembangunan Fisik Desa di Desa pulau Kedundung yang terealisasi di Tahun 2017 sesuai dengan peraturan Desa Pulau kedundung No.03 tanggal 30 desember tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulau Kedundung sebesar Rp. 765.848.000,- sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Realisasi Pembangunan Imprastruktur di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017

| No | Rencana Pembangunan | Anggaran | Ket |
|----|----------------------------------|-------------|-----|
| 1 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 328.843.000 | - |
| 2 | Pembangunan Box Culvert | 168.181.600 | - |
| 3 | Pembangunan Balai Pertemuan Desa | 268.823.400 | - |

Sumber: Kantor Desa Pulau Kedundung 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat ada 3 rencana pembangunan di Desa Pulau Kedundung pada tahun 2017, dimana pembangunannya dapat terealisasi 99 persen, namun terdapat masalah pada Pembangunan Jalan Usaha Tani, terdapat masalah dengan kualitas jalan tersebut, dimana jalan yang cepat rusak, jalan tersebut rusak dengan waktu yang sangat singkat, padahal Pembangunan Jalan Usaha Tani ini yang paling banyak menyedot anggaran, dan jalan ini sangat penting bagi masyarakat karena jalan tersebut adalah akses ke perkebunan masyarakat, namun sangat disayangkan sangat cepat rusak, bahkan saat ini jalan tersebut hanya bisa di lalui oleh motor saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya pembangunan ini, dan peneliti mengambil judul “Evaluasi Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Ilmu administrasi Negara adalah ilmu pengetahuan (cabang, ilmu administrasi) yang secara khas melakukan kajian terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur dan proses-proses yang terdapat dibagian yang sangat penting dari pada system dan aparatur pemerintahan (Anggara, 2012: 159)

Administrasi Negara diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga fungsi tingkatan umum dalam hirarki formal. Ditingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Ditingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang harus terus

berlangsung lama, seperti memberikan bahan, sarana-sarana, intruksi-intruksi, dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staff teknis atau professional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Ditingkat bawah adalah fungsi pengawas, dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja professional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan professional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Anggara, 2012 : 11).

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian administrasi, menurut Robbins (dalam Silalahi, 1989 : 9), bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas – aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain”.

Pendapat Siagian (dalam Silalahi, 1989 : 9) bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”. Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan menjunjung kerjasama yang tinggi untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya berupa tujuan dari suatu organisasi

2.1.1 Teori Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4). The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu : (Pasalong, 2011: 3)

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Siagian Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation-building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. (Siagian, 2009 : 4)

Administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan kehidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. (Siagian, 2009 : 5)

Mostopadidjaya menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu

menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. (dalam Afiffudin, 2010 : 51)

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan dibidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika dimasukkan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Dalam kamus bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip (Leo agustino, 2008 : 7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (AG Subarsono, 2011: 90-92):

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif, sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial

termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu factor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang menimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak.

Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut Nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (AG Subarsono, 2011: 8)

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.3 Teori/Konsep Evaluasi

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, karena disadari atau tidak, sebenarnya evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mylai dari berpakaian, setelah berpakaian ia berdiri dihadapan kaca apakah penampilannya wajar atau belum.

Menurut Suchman yang dikutip oleh (Arikunto, Jabar, & Abdul 2010: 56), evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain seperti dikemukakan oleh Stutflebeam yang dikutip oleh (Arikunto, Jabar, & Abdul 2010: 57), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut (Dimiyati & Mudjiono 2006: 19), pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Menurut Arifin & Zainal mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Purwanto & Ngalm 2010: 57).

Menurut Dunn (dalam Mulyadi, 2015: 124) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Evaluasi dapat digunakan untuk menyusun gradasi kemampuan karyawan, sehingga ada penanda simbolik yang dilaporkan kepada semua pihak. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif, obyektif, kooperatif, dan efektif. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada tujuan.

Agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat, maka evaluasi harus menerapkan seperangkat prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

- a. Valid Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan shahih. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki keshahihan yang dapat dipertanggungjawabkan maka data yang dihasilkan juga salah dan kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah.
- b. Berorientasi kepada kompetensi Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetensi produksi yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap keterampilan dan nilai yang terefleksi dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini maka, ukuran-ukuran keberhasilan proses produksi akan dapat diketahui secara jelas dan terarah.
- c. Berkelanjutan Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dari waktu-kewaktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan proses produksi, sehingga kegiatan dan unjuk kerja produksi dapat dipantau melalui penilaian.
- d. Menyeluruh Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, yang mencakup aspek dan meliputi seluruh materi serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian. Dengan berbagai bukti tentang hasil produksi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- e. Bermakna Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu evaluasi hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang produksi dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

Dengan mendasarkan pada pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, evaluasi proses produksi adalah suatu proses menentukan nilai proses produksi dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Pada hakekatnya, Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005 : 45).

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri 23 khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan³¹. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan teori Grigg yang menyatakan infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic perubahan.

Ada beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, yaitu:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah yang perlu disyukuri, sebab tidak semua negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan lengkap. Sumberdaya alam seperti hutan dengan segala isinya, hasil pertambangan sudah sewajarnya digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi hendaknya tidak dieksploitasi. Sebab keberadaannya perlu dipikirkan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai hasil hutan dijarah habis sehingga mengakibatkan hutan gundul dan pada gilirannya dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor

2. Akumulasi Modal

Modal atau kapital diperlukan dalam proses pembangunan. Modal diperlukan guna membiayai proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta. Modal dibentuk melalui proses tabungan, investasi dan akumulasi modal. Modal dapat diperoleh dari dalam negeri, yaitu melalui penghimpunan tabungan masyarakat maupun dari luar negeri melalui bantuan luar negeri atau hutang luar negeri dan investasi asing

3. Organisasi

Organisasi atau kumpulan sekelompok masyarakat sebagai tempat untuk mengorganisir semua kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui organisasi dapat tertampung aspirasi masyarakat yang berkembang terus. Melalui organisasi masalah-masalah pembangunan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan lebih demokratis.

4. Kemajuan Teknologi

Teknologi akan selalu mengalami perkembangan yang terus menerus.

Kemajuan di bidang teknologi akan membantu dalam proses pembangunan. Kemajuan di bidang teknologi hanya dimungkinkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Investasi sumberdaya manusia bukanlah investasi jangka pendek tetapi merupakan investasi untuk jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dilihat dalam sekejap.

Kemajuan suatu bangsa pada saat ini sangatlah ditentukan oleh kemajaun di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara-negara maju mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi. Hal ini memungkinkan karena di negara maju tersedia dana dan sumber daya manusia. Sebaliknya di negara sedang berkembang dana sangat terbatas dan sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas.

5. Pembagian Kerja

Sistem pembagian kerja yang dikemukakan oleh Adam Smith pada hakekatnya adalah sebagai suatu spesialisasi, dapat meningkatkan kerja atau produktivitas. Pembagian kerja diperlukan untuk meningkat ketrampilan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui produktitas yang tinggi. Produktivitas dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin dan ulet. Akan tetapi itu semua belum menjamin pada tingkat pendapatan yang tinggi. Sebab profesi atau jenis pekerjaan sangat menentukan tingkat upah yang diterima.

6. Skala Produksi

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah proses peningkatkan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemampuan untuk memproduksi baranga dan jasa sangat tergantung pada skala produksi yang dimiliki oleh suatu negara

7. Faktor Sosial

Kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat di negara sedang berkembang tidak dapat dilepaskan daerah kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat internasional, maka sistem sosial dalam negeri saling berhubungan sistem sosial internasional beserta dengan organisasi dan peraturan-peraturan pelaksanaan tentang ekonomi global. Aspek yang terpenting dari kondisi ini adalah munculnya fenomena dominasi dan dependensi atau ketergantungan di antara negara maju dengan negara-negara sedang berkembang.

8. Faktor Manusia

Sumber daya manusia sebagai agent of development, pelaksanaan dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan, sehingga bentuk dan sstem yang ada merupakan produk dari sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang handal merupakan aset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah. Di negara sedang berkembang pada umumnya sumber daya manusia yang dimiliki melimpah dengan kualiatas yang rendah. Dengan kondisi seperti ini jelas sangat menghambat proses pembangunan

9. Faktor Politik dan Administrasi

Pengaruh kepentingan dan kekuasaan pada masyarakat negara sedang berkembang mempunyai segmen yang berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung pada sistem sosial, ekonomi dan sejarah politik yang dimiliki oleh masing-masing negara sedang berkembang. Pada dasarnya di negara sedang berkembang peran militer dalam negara sangat kuat. Di Amerika Latin, kekuasaan negara terdiri dari militer, industrialis dan pemilik tanah, sedang di Afrika para politikus dan kaum buruh yang berkuasa.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di pakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang di lakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang di pelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 7)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuanlitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017 : 8).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pembangunan Fisik Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 di dapat :

5.1.1 Indikator Efektifitas

Efektifitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas sangat penting, karena untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan penyelenggaraan mengenai suatu pembangunan, khususnya dalam Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

1. Pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
Menurut pengamatan penulis bahwasanya pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Pelaksanaan pembangunan terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, hanya saja jalan Tani yang cepat rusak, itu karena beban mobil yang berat selalu melintasi jalan yang hanya tanah saja dan apabila ditambah musim penghujan yang mengakibatkan jalan tersebut cepat rusak.
2. Pencapaian tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
Menurut pengamatan penulis bahwasanya Pencapaian tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Capaian tujuan pembangunan selalu 100%, dengan yang direncanakan melalui musyawarah dengan masyarakat, dan selalu melakukannya dengan maksimal agar apa yang menjadi tujuan pembangunan ini dapat tercapai. Seperti jalan Usaha Tani ini, yang dapat memudahkan masyarakat,

meski sekarang memang jalan sudah tidak seperti awal lagi namun masih bisa dilalui dan dipergunakan dan masyarakat cukup banyak merasakan manfaatnya.

5.1.2 Indikator Efisiensi

Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, Efisiensi sangat penting, karena untuk mengetahui jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas pembangunan, khususnya dalam Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

1. Usaha oleh pihak pelaksana (pemerintah desa) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan penulis bahwasanya Usaha oleh pihak pelaksana (pemerintah desa) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, sebelum pembangunan, semua di musyawarahkan terlebih dahulu dengan menimbang apa manfaat pembangunan tersebut dengan masyarakat, dan tentunya sudah diputuskan bersama dengan masyarakat.
2. Tingkat efisiensi pembangunan yang dilakukan pemerintah desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan penulis bahwasanya Tingkat efisiensi pembangunan yang dilakukan pemerintah desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Pembangunan fisik dilakukan dengan seefisien mungkin dan pembangunan diperhitungkan dengan baik agar sesuai dengan kemampuan yang di miliki. efisien anggaran, sumber daya manusia, waktu serta di perhitungkan manfaat yang akan diterima masyarakat.

5.1.3 Indikator Kecukupan

Kecukupan sangat penting, karena untuk mengetahui Kecukupan sumber daya dalam Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

1. Kecukupan sumber daya manusia dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan penulis bahwasanya Kecukupan sumber daya manusia dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Sumber Daya Manusia yang ada sudah memadai untuk melaksanakan pembangunan agar terlaksana dengan baik, dengan adanya pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta orang-orang di pemerintahan desa sudah cukup baik memiliki sumberdaya yang baik serta dalam pembangunan memilih tukang atau pekerja yang memadai sesuai keahliannya.
2. Kecukupan sumber daya anggaran dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan penulis bahwasanya Kecukupan sumber daya anggaran dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Kecukupan untuk membangun semua usulan masyarakat tidak akan cukup, maka dilakukan musyawarah dengan masyarakat tentang apa yang paling diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat saja, karena pembangunan berpatokan pada dana yang dimiliki Desa, pemerintah desa terbuka kepada masyarakat mengenai keuangan desa, terdapat rincian jelas mengenai itu semua.

5.1.4 Indikator Kesamaan

Kesamaan yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, Kesamaan sangat penting, karena untuk mengetahui Kesamaan segala sesuatu dalam Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

1. Proses penentuan Pembangunan Fisik yang akan di lakukan Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut pengamatan penulis bahwasanya proses penentuan Pembangunan Fisik yang akan di lakukan Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Proses pembangunan fisik dilakukan dengan melalui musyawarah dengan masyarakat, dan dipilih dengan skala usulan terbanyak atau yang di prioritaskan, semua dilakukan melalui musyawarah benar-benar berdasarkan musyawarah dengan masyarakat, apa yang paling dibutuhkan masyarakat, proses penentuan pembangunan desa, pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil rapat dan diputuskan bersama masyarakat.

2. Kesamaan proses penyelenggaraan Pembangunan Fisik yang akan di lakukan Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut pengamatan penulis bahwasanya kesamaan proses penyelenggaraan Pembangunan Fisik yang akan di lakukan Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, sama sesuai peraturan, kesamaan proses penyelenggaraan pembangunan fisik dimulai dari musyawarah bersama masyarakat dalam menentukan apa yang akan dibangun dan dibutuhkan.

5.1.5 Indikator Ketanggapan

Ketanggapan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat, Ketanggapan sangat penting, karena untuk mengetahui bagaimana ketanggapan dalam Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

1. Ketanggapan pemerintahan desa dalam menampung aspirasi masyarakat mengenai pembangunan fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut pengamatan penulis bahwasanya ketanggapan pemerintahan desa dalam menampung aspirasi masyarakat mengenai pembangunan fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Tanggapan Pemerintah Desa dalam menampung aspirasi masyarakat cukup baik, tanggap menampung aspirasi masyarakat, melalui musyawarah Desa selalu mengutamakan apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat, dari usulan-usuan yang ada diputuskan bersama mana yang menjadi prioritas.

2. Kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan fisik yang di butuhkan masyarakat desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut pengamatan penulis bahwasanya Kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan fisik yang di butuhkan masyarakat desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Pemerintah dalam merealisasikan pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.1.6 Indikator Ketanggapan

Ketepatan yaitu yang berhubungan dengan hasil, apakah hasil yang diinginkan benar tercapai, Ketanggapan sangat penting, karena untuk mengetahui bagaimana hasil n dalam

Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

1. Apakah Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tepat dengan yang masyarakat butuhkan. Menurut pengamatan penulis bahwasanya Kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan fisik yang di butuhkan masyarakat desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Ketepatan pembangunan fisik selalu mengedepankan usulan prioritas dan azas manfaat, dan pembangunan dilakukan berdasarkan musyawarah bersama masyarakat, dan merealisasikan apa yang menjadi putusan yang ditetapkan saat musyawarah.
2. Hasil dari Pelaksanaan Pembangunan Fisik yang telah dilakukan pemerintah Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan penulis bahwasanya Hasil dari Pelaksanaan Pembangunan Fisik yang telah dilakukan pemerintah Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Hasil Pelaksanaan pembangunan fisik Desa sudah sangat baik dan sudah mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Kendala/hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik yang dilakukan pemerintah Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan penulis bahwasanya kendala/hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kendala utama ialah dana, Dana yang terbatas namun dengan pembangunan yang banyak ingin dilakukan, tidak mungkin semua yang diinginkan masyarakat dapat dibangun semua dalam setahun, jadi mengutamakan apa yang paling dibutuhkan masyarakat dan diputuskan bersama, selain itu pencairan dana yang sering terlambat, sehingga mengakibatkan keterlambatan melaksanakan pembangunan dan juga faktor alam dalam melaksanakan pembangunan.
4. Bagaimana mengatasi kendala/hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik. Menurut pengamatan penulis bahwasanya mengatasi kendala/hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik tersebut Melalui musyawarah masyarakat tentang apa yang menjadi hambatan pembangunan dan mencari jalan keluarnya bersama masyarakat.

5. SIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 sudah dilaksanakan sebaik mungkin, hanya saja jalan tani yang cepat rusak itu disebabkan oleh jalan yang tidak kuat dengan beban yang melalui jalan tersebut, dan diperparah dengan faktor alam hingga jalan tersebut cepat rusak, namun dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Yulius Emra, S.Sos dan Ibunda Rita Suhaida serta erta Adik Gerlius Haraji dan Guna Arih Arji yang memberiku semangat,

doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universaitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing I, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung

Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.

Arikunto, S. Jabar, C. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara

Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineke Cipta

Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit In Media. Jakarta

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Purwanto, Ngalim. 2010. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Subarsono, AG.2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelaja

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Sumber lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan